



Ringkasan

Saya ingin mengadu nasib dan merubah hidup saya sehingga anak saya bisa mendapat kehidupan yang lebih baik dari saya... Tapi saya diperlakukan dengan kasar oleh majikan. Saya mulai kerja jam 5 pagi dan kadang-kadang baru selesai jam 2 atau 3 pagi. Saya tidak dapat hari libur. Pintu rumah selalu dikunci, saya tidak boleh keluar rumah sendiri. Saya tidur di kamar makan.

Selama enam setengah bulan gaji saya dipotong [untuk membayar ongkos perekrutan]. Kalau saya tidak selesai [mengerjakan pekerjaan dengan cepat], majikan saya suka memukul... dia sering terik-teriak dan membentak saya. Suatu hari waktu saya menjemur pakaian, tetangga melihat mata saya bengkak dan bertanya kenapa. Saya bilang dipukul majikan. Malamnya polisi datang dan menahan majikan saya.

—Ati K., pekerja rumah tangga, Kuala Lumpur, Malaysia, 12 Februari 2010

Hingga kini, pekerjaan rumah tangga merupakan profesi tertua dan merupakan mata pencarian terpenting bagi jutaan orang di seluruh dunia..., pekerjaan sektor domestik masih tidak dihargai padahal merupakan sektor penting bagi ekonomi di luar rumah tangga.... Pekerjaan sektor domestik tidak diatur oleh peraturan apapun karena tidak dianggap sebagai layaknya pekerjaan kantor....

Kondisi pekerja rumah tangga tidak akan membaik tanpa usaha bersama untuk menyempurnakan kerangka kerja pengambilan keputusan... Hasil-hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengambilan keputusan yang baik dan diikuti oleh pengawasan yang tepat dapat memperbaiki kehidupan pekerja rumah tangga. Keberadaan mekanisme tersebut juga menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga memang sudah sepatutnya mendapat hak dan dihargai.

—Kesimpulan dari survei internasional mengenai peraturan dan perlakuan terhadap pekerja sektor domestik, Organisasi Buruh Internasional (ILO), 2009¹

¹ ILO, Decent Work for Domestic Workers, Report IV (1), Konferensi Buruh Internasional, Sesi ke-99 tahun 2010 (Jenewa, Kantor Buruh Internasional, 2009), hal. 94.

Tanggal 1 Mei merupakan Hari Buruh Internasional. Pada hari itu banyak negara di dunia menetapkannya sebagai hari libur yang dimaksudkan untuk memberikan waktu istirahat kepada para pekerja dan merayakan keberhasilan yang dicapai oleh gerakan buruh. Namun pada hari itu juga jutaan pekerja rumah tangga yang pada umumnya perempuan dan remaja masih harus giat melakukan tugasnya. Para pekerja rumah tangga yang seringkali dibebani banyak pekerjaan dan dibayar rendah ini mengerjakan tugas penting bagi suatu rumah tangga dan sekaligus memberikan kesempatan bagi pemilik rumah untuk bekerja di sektor ekonomi formal. Sayangnya selama bertahun-tahun hasil jerih payah kerja mereka tidak tampak dari luar rumah tempat mereka bekerja. Disamping itu banyak negara yang masih belum memberikan pengakuan mengenai keberadaan mereka atau memberikan perlindungan yang sama di bawah undang-undang ketenagakerjaan.

Ada beberapa negara di Timur Tengah dan Asia yang menampung pekerja migran sektor domestik dalam jumlah besar, yaitu antara 196 ribu di Singapura hingga 1,5 juta di Arab Saudi. Meningkatnya pemberitaan dan kesadaran mengenai kesewenangan yang dihadapi oleh para pekerja ini menggulirkan pembahasan kebijakan yang dinamis. Dalam beberapa kasus pembahasan tersebut kemudian menghasilkan perubahan. Laporan yang berdasarkan penelitian selama enam tahun ini merupakan survei menyoroti praktik terbaik serta perbedaan yang ada pada pola pekerja, imigrasi, dan reformasi hukum pidana di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Lebanon, Singapura dan Malaysia.

Jutaan wanita di Asia dan Afrika yang tidak memiliki kemampuan sosial dan ekonomi, memilih untuk menjadi pekerja migran sektor domestik di Timur Tengah dan Asia. Bagi mereka hal tersebut merupakan satu dari sedikit kesempatan untuk mendapat uang guna membangun rumah, membayar pengobatan dan pendidikan, serta memenuhi kebutuhan dasar keluarga di kampung halaman. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka mendapat tempat kerja yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan keuangan keluarga.

Tetapi, keamanan dan peluang ekonomi masih bersifat untung-untungan serta belum dijamin. Gabungan dari berbagai masalah perbedaan undang-undang ketenagakerjaan, sistem visa yang memberikan kekuasaan yang besar kepada majikan terhadap pekerja dan rasisme terhadap “pembantu” berkulit gelap, berperan dalam terciptanya kesewenangan di tempat kerja bagi pekerja migran sektor domestik di negara-negara tujuan. Di samping waktu kerja yang sangat padat dan panjang, tanpa libur serta upah tambahan yang kecil atau tidak ada sama sekali, banyak majikan yang memegang paspor para pekerja dan mengunci mereka di dalam rumah. Banyak kasus dimana para pekerja berada dalam kondisi kerja yang mirip dengan perbudakan serta mengalami kekerasan fisik dan seksual serta kekurangan makan yang bisa berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Dalam skenario terburuk, pekerja migran sektor domestik harus kehilangan nyawa atau terperangkap dalam situasi kerja paksa dan perdagangan manusia.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, maraknya gerakan organisasi hak asasi manusia, perempuan dan pekerja migran, dukungan dari serikat pekerja, perhatian dari badan internasional seperti ILO dan gencarnya pemberitaan media semakin meningkatkan tekanan agar pemerintah bertindak, termasuk perubahan di bidang keimigrasian serta perburuhan.

Negara-negara yang dibahas dalam laporan ini mulai memprakarsai perbaikan perlakuan terhadap pekerja rumah tangga atau mencegah dan menanggapi kasus penyiksaan. Namun perubahan baru terjadi sedikit demi sedikit dan lamban dan banyak perubahan penting yang sangat dibutuhkan masih tertinggal jauh seperti dimasukkannya pekerja rumah tangga dalam undang-undang perburuhan, pencabutan kekuasaan majikan terhadap status imigrasi pekerja, dan pengawasan ketat atas proses perekrutan. Upaya perubahan sering berbenturan dengan kepentingan majikan yang khawatir dengan kenaikan biaya upah dan berkurangnya kenyamanan, penyalur pekerja yang mendapat untung dari lemahnya peraturan, dan pejabat pemerintah yang berpandangan bahwa pekerja migran merupakan ancaman bagi keamanan negara.

Peningkatan perlindungan pekerja rumah tangga tidak hanya masuk dalam agenda reformasi dan debat publik secara nasional tetapi sudah mencapai tingkat global. Walaupun pekerja rumah tangga sudah diberikan hak-haknya di bawah konvensi buruh internasional, standar konvensi ini belum mengacu pada keunikan kondisi pekerjaan seperti tempat kerja di rumah pribadi, atau memberikan arahan yang cukup kepada mereka untuk menjamin akses terhadap kondisi kerja yang layak. Untuk memberikan penghargaan atas pentingnya perlindungan terhadap sektor yang menyediakan lapangan pekerjaan yang sudah lama tidak diacuhkan dan tidak dihargai, pada bulan Juni 2010 negara-negara anggota ILO akan memulai pembahasan mengenai kemungkinan dirancangnya perangkat internasional yang baru, bisa saja berupa perjanjian mengikat, sebagai standar internasional bagi pekerja rumah tangga.

Banyak negara berpendapat bahwa tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap rumah pribadi sebagai tempat kerja dengan alasan pelanggaran privasi majikan dan kesulitan memantau hal-hal seperti jam kerja. Namun, peraturan kerja di Hong Kong dan Afrika Selatan memiliki contoh yang baik seperti: pekerja rumah tangga memiliki hak atas upah minimum, upah lembur, libur mingguan, cuti melahirkan dan cuti tahunan. Walaupun para pekerja di kedua negara ini tetap rentan terhadap tindakan kasar, mereka memiliki akses terhadap penyelesaian hukum. Hal ini tentu saja berbeda dari rekan mereka yang bekerja di

negara lain. Karena cukup bebas membentuk organisasi dan serikat kerja, para pekerja rumah tangga di kedua negara itu memiliki pemahaman yang lebih baik atas hak-hak mereka, mampu melakukan tawar-menawar untuk keadaan kerja yang lebih baik dan akses untuk melapor kesewenangan di tempat kerja.

Dari negara-negara yang masuk dalam laporan survei ini, Yordania telah mengambil langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Yordania merupakan satu-satunya negara yang telah melakukan amandemen dengan memasukan pekerja rumah tangga dalam undang-undang perburuhan, jaminan perlindungan seperti pembayaran gaji bulanan melalui rekening bank, libur mingguan, cuti sakit dan tahunan, dan waktu kerja maksimal 10 jam sehari. Namun undang-undang pekerja rumah tangga tersebut masih belum memberikan hak-hak yang sama seperti yang diberikan kepada pekerja lain. Sebagai contoh pekerja tidak diperkenankan meninggalkan tempat kerja tanpa ijin majikan walaupun dalam waktu istirahat dan hanya berhak atas 8 jam istirahat pada malam hari. Di samping itu ujian terhadap undang-undang ini adalah keberhasilan pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang baru dan mengawasi penerapannya.

Kebanyakan negara penerima pekerja lainnya bergantung pada penerapan kontrak kerja standar untuk mengatur syarat-syarat pekerjaan. Keberadaan kontrak tersebut sudah merupakan kemajuan daripada tidak ada perjanjian kerja resmi atau penetapan standar minimum sama sekali. Hanya saja perjanjian tersebut lebih lemah dari pada peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh kontrak standar yang berlaku di Singapura tidak mensyaratkan diberikannya libur mingguan, tetapi memberikan pilihan kepada majikan dan pekerja untuk menegosiasikan 1 hingga 4 hari libur perbulannya atau pilihan untuk mendapat uang sebagai pengganti hari libur. Karena pekerja khawatir kehilangan pekerjaannya dan posisi tawar yang rendah, kebanyakan dari mereka tidak berada pada posisi yang dapat menuntut waktu libur. Sementara kontrak kerja yang berlaku di Uni Emirat Arab tidak mensyaratkan adanya waktu istirahat dalam sehari sedikitpun. Kontrak kerja yang berlaku di kedua negara ini juga tidak memuat hak pekerja atas lembur dan pembatasan waktu kerja dalam sehari.

Sistem imigrasi yang mengikat status keimigrasian pekerja rumah tangga dengan majikannya juga menciptakan ketidakseimbangan hubungan antar keduanya dan berpotensi menimbulkan kesewenangan. Majikan dapat dengan sesuka hati mengembalikan pekerja atau tidak memberi ijin kepada pekerja untuk berganti majikan. Di negara-negara yang memiliki populasi pekerja migran yang besar, perubahan sistem merupakan masalah yang peka karena kekhawatiran jika pengendalian imigrasi

dilonggarkan akan meningkatkan migrasi gelap. Terlepas dari meningkatnya konsensus bahwa sistem “pemberian sponsor” dalam keimigrasian di Timur Tengah justru mendorong kondisi yang mirip dengan perbudakan, perubahan dalam bidang ini berjalan seperti siput. Pandangan negatif para majikan bahwa pekerja asing adalah orang yang sembarangan dan naif terus digunakan untuk membenarkan penerapan peraturan yang sangat ketat dan otoriter yang memberikan kesempatan kepada majikan untuk mengendalikan segala aspek kehidupan pekerja rumah tangga.

Pemerintah juga belum memberikan cukup perhatian untuk menciptakan mekanisme pemantau untuk mengendus kasus-kasus penipuan, eksploitasi, dan kesewenangan terhadap pekerja rumah tangga, atau mengambil langkah untuk membuka sistem perburuhan dan proses hukum menjadi lebih terjangkau dan tanggap. Perbaikan perlakuan terhadap pekerja rumah tangga memerlukan jalur-jalur pengawasan dan pengaduan yang efektif seperti penyebaran informasi secara luas seputar hak dan kewajiban majikan serta pekerja, pengawasan secara acak dan penerapan hukum berat bagi pelanggaran.

Singapura terlihat sebagai negara yang aktif dan berhasil menjatuhkan hukuman kepada majikan dan penyalur yang melakukan kekerasan fisik kepada pekerja rumah tangga. Sementara negara-negara lain yang tercantum dalam laporan ini memiliki catatan yang beraneka ragam. Beberapa majikan dijatuhi hukuman berat tetapi berbagai rintangan menghalangi tercapainya prestasi seperti itu. Sebagai contoh, sistem untuk mengajukan laporan sering kali berada di luar jangkauan pekerja rumah tangga yang terkurung dalam rumah majikan dan tidak bisa berbicara menggunakan bahasa setempat. Untuk kasus-kasus yang sampai ke tangan yang berwenang, proses pengadilan dapat berlangsung selama bertahun-tahun sementara pelapor tidak dapat bekerja dan biasanya harus menunggu di tempat penampungan yang memiliki jumlah penghuni melebihi kapasitas. Waktu tunggu yang lama dan ketidakpastian hasil akhir membuat kebanyakan pelapor menarik laporannya atau bernegosiasi untuk mendapat penggantian uang sehingga mereka bisa kembali ke kampung halamannya dengan segera. Dalam kasus lain di Arab Saudi, pekerja rumah tangga terpaksa harus berhadapan dengan tuntutan balik yang menuduh mereka telah melakukan pencurian, guna-guna dan zinah.

Beberapa perubahan yang menggembirakan dalam tahun-tahun terakhir ini adalah munculnya gerakan yang membela hak pekerja migran. Organisasi-organisasi yang mengusung hak-hak pekerja semakin banyak jumlah dan keragaman serta kemampuannya. Banyak jejaring informal yang meresmikan kegiatannya, memperoleh pendanaan dan membangun penyediaan layanan seperti tempat penampungan bagi pekerja yang sedang tertimpa masalah, loket bantuan di bandar udara dan pusat perbelanjaan serta kursus

pelatihan bagi pekerja dengan memanfaatkan waktu mereka untuk mengembangkan kecakapan sehingga mampu meningkatkan status ekonominya. Dalam beberapa kasus organisasi-organisasi ini berhasil membangun hubungan baik dengan badan-badan pemerintah seperti pejabat-pejabat yang berwenang mengawasi persengketaan kerja atau proses deportasi.

Laporan ini disusun berdasarkan riset yang berkelanjutan dan proses advokasi yang dilakukan Human Rights Watch kepada pekerja migran sektor domestik serta hasil kerja kami di Bahrain, Indonesia, Yordania, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka dan Uni Emirat Arab.

Rekomendasi Utama Untuk Pemerintah Negara Penerima Pekerja

Untuk Parlemen Dan Kementerian Tenaga Kerja

- Memperluas cakupan perlindungan kepada pekerja rumah tangga dalam undang-undang, termasuk pasal mengenai upah minimum, waktu istirahat harian dan mingguan, uang lembur, jaminan sosial, kompensasi pekerja, layanan kesehatan dan cuti melahirkan. Memberikan perlindungan tambahan untuk memperhatikan sifat khusus dari pekerjaan rumah tangga seperti waktu kerja yang tidak beraturan, tempat tinggal dan penyediaan makanan.
- Memperketat pengaturan dan pengawasan agen penyalur pekerja, biaya perekrutan dan menjatuhkan sanksi berat terhadap pelanggaran peraturan dan perundang-undangan hak-hak pekerja rumah tangga.
- Menjamin kebebasan bagi pekerja rumah tangga untuk berkumpul dan berserikat dan melakukan tawar-menawar secara kolektif kepada majikan dan agen penyalur.

Untuk Kementerian Dalam Negeri

- Mereformasi sistem visa sponsor sehingga visa pekerja tidak lagi terikat dengan majikan pemberi kerja sebagai sponsor imigrasi. Menjamin bahwa pekerja dapat berganti majikan tanpa kehilangan status hukumnya dan tanpa harus mendapat ijin dari majikan lama serta mereka dapat meninggalkan negara tempat dia bekerja tanpa harus mendapat ijin majikan.
- Memfasilitasi pemberian persetujuan status keimigrasian yang resmi kepada pekerja yang menunggu hasil proses pengadilan dan mengizinkan mereka untuk bekerja.

Untuk Kementerian Luar Negeri

- Mempromosikan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara asal tenaga kerja untuk menjamin kontrak kerja yang diterapkan di negara tujuan agar sama dengan yang telah ditandatangani pekerja sebelum bermigrasi, memantau proses perekrutan antar negara (termasuk membatasi ongkos perekrutan), menyelesaikan sengketa kerja dan laporan pidana yang masih ada dan melakukan proses pengembalian pekerja dengan cepat.
- Mendukung konvensi mengikat serta memberikan rekomendasi selama Konferensi Buruh Internasional pada Juni 2010.

Untuk Kementerian Kehakiman Dan Kesejahteraan Sosial

- Memperbaiki akses terhadap sistem hukum kriminal, termasuk melalui mekanisme pelaporan tertutup menggunakan bahasa yang dimengerti oleh pekerja dan menyediakan bantuan hukum.
- Memperluas layanan terhadap pekerja yang menjadi korban kekerasan, seperti tempat penampungan, jalur telepon khusus, akses terhadap layanan kesehatan, konsultasi dan dukungan kepada organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang memberikan layanan-layanan ini.
- Meningkatkan identifikasi kasus-kasus perdagangan manusia dalam tempat kerja yang memiliki kondisi seperti perbudakan dan menjamin korban mendapat akses kepada jenis perlindungan khusus dan layanan di bawah undang-undang anti perdagangan manusia dan program negara lainnya.
- Mengambil langkah untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum pidana kekerasan terhadap pekerja rumah tangga termasuk kekerasan fisik, seksual, kerja paksa dan perdagangan manusia. Membangun mekanisme untuk mempercepat proses-proses yang menyangkut pekerja migran.